BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Gempa bumi berkekuatan hampir 9.0 pada skala richter terjadi di lepas pantai Sumatera pada hari minggu 26 Desember 2004 memicu serangkaian gelombang tsunami yang menghancurkan daerah pesisir di 14 negara di sekitar Samaudera Hindia. Bencana ini tercatat sebagai bencana alam terburuk selama 1 dekade terakhir.

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami tersebut, khususnya kawasan Nangroe Aceh Darussalam. Bencana tersebut menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Musibah itu tak hanya merenggut ratusan ribu korban jiwa masyarakat Aceh melainkan juga menghancurkan sebagian besar insfrastruktur, permukiman, sarana sosial seperti gedung sekolah, ekonomi dan lain-lain. Bencana itu juga mempengaruhi kondisi sosial politik masyarakat Aceh, termasuk dampak psikologisnya.

Sebagai sebuah solidaritas internasional, telah banyak bantuan yang diterima oleh pemerintah indonesia dari berbagai negara, organisasi internasional baik IGO ataupun INGO sampai individu. Pasca tsunami, sekitar 150 negara mengirim perwakilannya ke Aceh. Sampai Maret 2005 tercatat sebanyak 7.000 orang asing tersebar di Aceh dengan tugas sebagai relawan kemanusiaan.

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi serta negara-negara yang berkomitmen untuk memberikan bantuan terhadap bencana

yang terjadi di kawasan Asia Tenggara termasuk Aceh. Untuk diketahui bahwa UE adalah pemberi bantuan dana terbesar di dunia untuk operasi-operasi kemanusiaan. Melalui Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan atau *European Community Humanitarian aid Office* (ECHO) yang merupakan departemen dalam Komisi Eropa yang khusus mengurusi bantuan kemanusiaan yang didanai oleh UE. ECHO berada di bawah tanggung jawab Komisioner Louise Michel dan memiliki mandat untuk melakukan operasi-operasi kemanusiaan di seluruh belahan dunia.

Komisi Eropa adalah donor besar pertama yang memberikan bantuan penanganan bencana tsunami di Aceh. Dana sebesar 60 juta Euro telah digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan sebagai upaya tanggap darurat yang diantaranya adalah sistem peringatan dini epidemik, layanan kesehatan dasar dan bantuan psikososial, penelusuran dan penyatuan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya, fasilitas air bersih dan sanitasi, peningkatan kondisi kehidupan penduduk yang tinggal di pusat-pusat penampungan pengungsi, pemulihan kembali kegiatan nelayan serta layanan telfon satelit.

Selain dari Uni Eropa, Pemerintah Indonesia juga banyak menerima bantuan dari berbagai negara, individu maupun institusi yang peduli terhadap penderitaan masyarakat Aceh pasca terjadinya bencana tsunami. Banyaknya jumlah bantuan yang diterima ternyata menimbulkan masalah yang baru bagi pemerintah Indonesia. Mereka seakan tidak siap dalam menerima dan menentukan pendanaan bagi upaya pemulihan kondisi di Aceh. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia meminta dan bekerjasama dengan *World Bank* dan Uni

Eropa untuk membentuk sebuah lembaga sementara yang akan mengkoordinasikan dana bantuan yang masuk untuk segera bisa dialokasikan sesuai dengan perencanaan rekonstruksi yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia.

Akhirnya pada tanggal 12 April 2005 MDTFANS terbentuk. Lembaga ini mengkoordinasikan dana bantuan yang berasal dari Para Donor, yang terdiri dari 12 negara (Belanda, Inggris, Kanada, Swedia, Norwegia, Denmark, Jerman, Belgia, Finlandia, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Irlandia) Komisi Eropa, *World Bank* dan *Asian Development Bank*. Masa kerja MDTFANS akan berakhir pada 30 Juni 2010. Hingga saat ini, MDTFANS memiliki dana yang berjumlah sekitar 700 juta Dollar Amerika yang 85% diantaranya didanai oleh UE (Komisi Eropa dan negara-negara anggota UE). Sejak Bulan November 2006, MDTFANS telah mengembangkan suatu portofolio yang cukup besar yang terdiri dari 16 proyek untuk rekonstruksi di Aceh yang memobilisasikan dana sebesar US$ 482 juta. Portofolio tersebut memberikan bantuan yang diperlukan untuk empat sektor dalam upaya rekonstruksi di Aceh. Keempat sektor tersebut adalah pemulihan kemasyarakatan, pemulihan infrastruktur skala besar dan transportasi, pembangunan kembali tata kelola serta pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, hipotesis yang peneliti ambil telah terbukti yaitu **"Jika bantuan dana yang diberikan Uni Eropa melalui *Multi Donor Trust Funds for Aceh and North Sumatera (MDTFANS)* dapat dimaksimalkan sesuai proyek yang ditentukan,**

maka proses rekonstruksi di Aceh pasca bencana tsunami 2004 akan berjalan dengan baik ”. Bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa melalui kerangka MDTFANS telah dimaksimalkan pada proyek-proyek yang terbentuk melalui keputusan bersama dari organ-organ yang ada dalam tubuh MDTFANS, termasuk di dalamnya UE sendiri telah membantu Aceh dalam upaya rekonstruksi pasca bencana tsunami. Indikator keberhasilan dari proses rekonstruksi Aceh dapat dilihat dari pelaksanaan proyek-proyek MDTFANS yang dimulai sejak tahun 2005. Dimana sampai dengan Bulan September 2007, telah banyak kemajuan yang dicapai oleh setiap proyek dalam setiap sektornya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Substansial

Sebagaimana para pemangku kepentingan lain di Aceh, proyek-proyek MDTFANS menghadapi berbagai keterlambatan di lapangan, terutama pada masa-masa awal. Tantangan-tantangan utamanya adalah mencari staf-staf sesuai standar kebutuhan kualifikasi dalam lingkungan yang kompetitif, mempersiapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama dalam lingkungan pemangku kepentingan yang kompleks, dan merekrut konsultan dengan kualifi kasi tinggi yang mampu bekerja dalam lingkungan di Aceh yang dinamis. Sedangkan proyek-proyek yang berada pada anggaran pemerintah menghadapi tantangan untuk membentuk mekanisme yang sesuai agar dapat menyalurkan dana dengan tepat.

Koordinasi merupakan hal penting untuk melihat keberhasilan rekonstruksi. Koordinasi aktivitas dengan para pemangku kepentingan lain yang akan

menerapkan atau berencana untuk menjalankan kegiatan serupa merupakan tantangan yang terjadi terus-menerus dan dapat menyebabkan keterlambatan implementasi. Di dalam proyek-proyek swadaya masyarakat, kurangnya koordinasi seringkali memaksa masyarakat untuk mengatur kembali rencana mereka karena ternyata terdapat pihak luar yang ingin membangun infrastruktur yang sedianya akan dikelola dengan dana hibah.

5.2.2 Saran Metodologis

Dalam penelitian ini dirasakan masih banyak terdapat kekurangan terutama dalam hal penyajian data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, bagi pihak yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan dapat lebih menyajikan data-data yang lebih valid dan akurat. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan studi kepustakaan, oleh karenanya diharapkan bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek yang sama dapat menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta sudut pandang yang berbeda agar kelak dapat memperluas khasanah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.